

---

**PLURALISME AGAMA SEBAGAI KUNCI MEMBANGUN  
TOLERANSI DI LINGKUNGAN KERJA RUMAH SAKIT OTAK DR.  
DRS. HATTA BUKITTINGGI**

Najmal Hadi Zain<sup>1</sup>, Novi Hendri<sup>2</sup>, Syafwan Rozi<sup>3</sup>, Arman Husni<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Email: [najmalhadi@gmail.com](mailto:najmalhadi@gmail.com)<sup>1</sup>, [novihendri@uinbukittinggi.ac.id](mailto:novihendri@uinbukittinggi.ac.id)<sup>2</sup>,  
[syafwanrozi@uinbukittinggi.ac.id](mailto:syafwanrozi@uinbukittinggi.ac.id)<sup>3</sup>, [armanhusni@uinbukittinggi.ac.id](mailto:armanhusni@uinbukittinggi.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstrak:** Pluralisme agama seharusnya menjadi tolok ukur toleransi antar umat beragama di tengah keberagaman kepercayaan dengan sikap toleran, berkeadilan dalam rangka menuju civil society dan lingkungan kerja yang kondusif, harmoni sosial dan produktivitas. Tujuan penulisan ini untuk membahas pluralisme agama sebagai cara merawat toleransi dalam beragama di lingkungan kerja Rumah Sakit Otak M.Hatta Bukittinggi. Dalam konteks tempat kerja yang beragam secara keagamaan, diperlukan sikap saling menghargai dan memahami perbedaan keyakinan antar individu. Hasil Penelitian menunjukkan pegawai non muslim penerapan sikap pluralisme diwujudkan melalui keterbukaan terhadap keragaman praktik keagamaan dan kesediaan untuk menjalin kerja sama lintas iman. Sementara itu, bagi Muslim, sikap moderat atau wasathiyah menjadi kunci dalam merawat toleransi, dengan mengedepankan nilai-nilai inklusif dalam berinteraksi menjunjung tinggi prinsip hidup berdampingan secara damai. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan suasana kerja yang kondusif dan damai, tetapi juga memperkuat kohesi sosial serta menghargai hak setiap individu dalam menjalankan agamanya. Dengan demikian, merawat toleransi melalui pluralisme dan moderatisme menjadi langkah strategis dalam membangun lingkungan kerja yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pluralisme, Toleransi, Lingkungan Kerja.

***Abstract:** Religious pluralism should be a benchmark for tolerance between religious communities amidst the diversity of beliefs with a tolerant, just attitude in order to move towards a civil society and a conducive work environment, social harmony and productivity. The purpose of this paper is to discuss religious pluralism as a way to maintain tolerance in religion in the work environment of the M. Hatta Brain Hospital Bukittinggi. In the context of a religiously diverse workplace, an attitude of mutual respect and understanding of differences in beliefs between individuals is needed. The results of the study showed that non-Muslim employees' implementation of pluralism attitudes was manifested through openness to the diversity of religious practices and a willingness to establish interfaith cooperation. Meanwhile, for Muslims, a moderate or wasathiyah attitude is the key to maintaining tolerance, by prioritizing inclusive values in interacting and upholding the principle of peaceful coexistence. This approach not only creates a conducive and peaceful work atmosphere, but also strengthens social cohesion and respects the rights of every individual to practice their religion. Thus, maintaining tolerance through pluralism and moderation is a strategic step in building a healthy, fair and sustainable work environment.*

***Keywords:** Pluralism, Tolerance, Work Environment.*

**PENDAHULUAN**

Perdebatan mengenai fenomena pluralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menarik untuk dikaji. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keharaman pluralitas pada tahun 2005 yang menyamakan pluralitas dengan liberalisme dan sekularisme memberikan respon kritis di kalangan intelektual muslim dan masyarakat terhadap fatwa tersebut. Terdapat banyak tulisan yang sangat kritis untuk pemaknaan pluralitas sempit tersebut diantaranya M. Dawam Rahardjo: *Mengapa Semua Agama Itu Benar* (2006), Martin Lukito Sinaga: *Agama Tanpa Sosiologi Agama, Meninjau Wacana Pluralisme di Indonesia* (2006), Trisno S. Susanto: *Membaca (kembali) Politik Pluralisme, Catatan untuk Martin Lukito Sinaga* (2006). Kedua tulisan ini mengkritisi fatwa pluralisme oleh MUI yang miskin perspektif dan memantik kontroversi. Sedangkan tulisan Rahardjo, menurutnya dalam menghadapi keberagaman kita membutuhkan pluralisme. Konsekuensinya yaitu jika satu pihak menerima pluralitas sebagai realitas sedangkan pihak lain menolak pluralisme sebagai suatu paham.

Konstruksi masalah yang timbul akibat berbeda keyakinan juga berpengaruh terhadap agama lain, katakanlah antara Hindu dan Islam, Islam dan Kristen, Budha dan Hindu dan seterusnya. Masing-masing (konstruksi) agama selalu ada keinginan membandingkan antara agama sendiri dengan agama lain yang kemudian berujung pada suatu klaim kebenaran (*truth claim*) terhadap keunggulan dalam hal otentisitas agamanya sendiri. Sebaliknya, jika pemahaman pluralitas tersebut dimaknai sebagai realitas dan juga paham maka sikap toleransi beragama sangat mungkin diciptakan. Menurut Rosyid (2014) keselarasan beda agama dan aliran di Kudus merupakan cerminan pluralitas antara Nahdliyin, Kristiani, Buddhis, dan Ahmadi. Kerukunan terwujud karena adanya kesadaran akan kesamaan aspek budaya. Selain itu, mayoritas ekonomi masyarakat pada skala sedang (tidak miskin) sehingga tidak mudah tersulut konflik, tidak adanya loko pemicu konflik. Terakhir, adanya ikatan kekeluargaan dan keakraban dalam kehidupan sosial antar dan intern-pemeluk agama dan aliran.

Hidup dalam nuansa pluralitas merambah bidang-bidang lainnya meliputi bidang ekonomi, sosial maupun bidang lain yang berpotensi. Kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok saat berbicara di Kepulauan Seribu tanggal 27 September 2016 yang mengutip ayat Alquran surat Al-Maidah ayat 51 memberikan sinyalemen bahwa hukum juga harus bertindak secara tegas dan responsif. Menurut Kombes Heri, Polisi sudah menetapkan Ahok menjadi

Tersangka dalam hal Penistaan Agama tersebut dan melanggar pasal 156 KUHP dan atau Pasal 156a KUHP dan UU ITE tetapi jaksa tidak memakai UU ITE dalam Dakwaannya. Lebih hanya kepada kedua pasal tersebut dalam Surat Edaran Kapolri tentang Ujaran Kebencian SE/06/X/2015 (Akbar, 2017).

Memudarnya sikap intoleransi merupakan dampak dari sikap fanatik dibingkai dalam klaim kebenaran absolut. Dalam klaim kebenaran sebenarnya terjadi pembatasan (teritorialisasi) secara rigit antara pemahaman yang benar dan yang salah. Sebagaimana yang terjadi dalam pembatasan yang bersifat geografis, pembatasan dalam wilayah agama juga ditandai dengan adanya sikap protektif dan konservatif agar wilayah (pemahaman) yang dianggap salah, tidak merusak wilayah yang benar. Oleh karena itu, terdapat persyaratan yang ketat untuk memasuki dan diakui sebagai bagian pemahaman yang benar selanjutnya menurut Esack (1997) membentuk sikap konservatisme. Jika terjadi terhadap kaum Muslim, konservatisme ditandai semakin sempitnya basis teologis dalam mendefinisikan iman, Islam, dan memperluas basis bagi kufur sehingga semakin sedikit yang dianggap beriman dan makin banyak yang digolongkan kafir. Lebih ekstrim membuat jarak dengan kelompok atau agama lain semakin lebar.

Semakin renggangnya jarak sosial sangat mengancam keutuhan kehidupan (disintegrasi) berbangsa dan bernegara dalam rangka mencapai tujuan- tujuan politik, sosial, dan ekonomi mencakup peningkatan kesejahteraan hidup, keadilan sosial dan rasa aman bagi setiap anggota masyarakat (*human security*). Untuk mencapai tujuan tersebut maka usaha modernisasi, pembangunan, demokratisasi dan pembaharuan ekonomi. Pertanyaan penting yang harus dijawab apakah model pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan rasa aman masyarakat. Sementara itu di beberapa daerah yang dilanda konflik seperti Aceh dan Papua rakyat kecil semakin kehilangan rasa aman karena menjadi korban akibat konflik negara dengan kelompok separatis. Sumandoyo (2015).

Pluralisme di lingkungan kerja yang majemuk bukan saja dimaknai sebagai keberagaman entitas antar agama, budaya, etnis semata namun makna tersebut dipahami sebagai perwujudan keshalehan sosial. Di sisi lain, pluralitas itu sendiri berpotensi menjadi bencana sosial ketika ketimpangan pembangunan masih terjadi. Timpangan yang tinggi juga menyulut aksi

radikalisme, mengasingkan diri untuk bergaul dengan non muslim, memilih pimpinan institusi yang sesama agama yang dapat menyebabkan konflik bertopeng agama.

Rumah Sakit Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi (RSOMH) adalah rumah sakit vertikal yang berada di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rumah sakit ini terletak di Jalan Sudirman, Bukittinggi, Sumatera Barat, dan memiliki luas lahan sekitar 1,2 hektare dengan kapasitas 142 tempat tidur perawatan. Rumah Sakit Otak DR.Drs.M.Hatta Bukittinggi yang lingkungannya memiliki ragam agama, kepercayaan dan budaya sarat dengan pluralisme terutama yang terkait dengan agama sebagai takdir dan selalu berada dalam posisi problematis. Rumah Sakit Otak Dr. Drs. Hatta Bukittinggi sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan rujukan di Sumatera Barat memiliki lingkungan kerja yang sangat beragam. Para pegawai yang bekerja di rumah sakit ini berasal dari latar belakang etnis, budaya, dan agama yang berbeda. Dalam konteks tersebut, keberagaman menjadi realitas yang tak terelakkan dan harus dikelola secara bijak demi menciptakan suasana kerja yang harmonis, produktif, dan profesional.

Pluralisme dan moderasi beragama menjadi dua nilai penting dalam menjaga dan merawat kerukunan di tengah keberagaman tersebut. Pluralisme bukan sekadar pengakuan terhadap perbedaan, tetapi juga keterbukaan untuk berdialog dan hidup berdampingan secara damai. Sementara itu, moderasi beragama menekankan pada sikap beragama yang tidak ekstrem, mengedepankan toleransi, keseimbangan, dan saling menghormati dalam kehidupan sosial, termasuk di lingkungan kerja.

Dalam dunia kerja yang menuntut kolaborasi tinggi seperti di rumah sakit, konflik yang disebabkan oleh perbedaan pandangan keagamaan atau praktik kepercayaan dapat mengganggu profesionalisme dan pelayanan kepada pasien. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai pluralisme dan moderasi beragama di kalangan pegawai, agar terbangun budaya toleransi yang kokoh. Toleransi antarpegawai bukan hanya menciptakan suasana kerja yang nyaman, tetapi juga menjadi bagian dari etos kerja yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman Indonesia.

Melalui pendekatan pluralisme dan moderasi beragama, Rumah Sakit Otak Dr. Drs. Hatta Bukittinggi dapat menjadi contoh institusi pelayanan publik yang tidak hanya unggul dalam hal medis, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun harmoni sosial di tengah keberagaman. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi wacana, tetapi terwujud nyata dalam sikap dan perilaku sehari-hari pegawai di lingkungan kerja.

Konflik antarpemeluk yang berbeda agama dan antaretnik di Indonesia selalu muncul baik secara terlihat maupun laten. Konflik tersebut dicirikan sebagai persaingan untuk mencari pendukung dan persaingan untuk kemurnian dan keaslian dari ajaran agama masing-masing. Walaupun demikian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah berkomitmen bahwa modal dasar multikultural dan multiagama itu harus dirangkai dengan sikap toleransi dan jiwa integrasi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode kualitatif yang dapat mengarahkan kebersamaan dan toleransi antar agama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif tentang bagaimana umat beragama berinteraksi dengan baik agar terciptanya kebersamaan dan kerja sama antar kelompok yang tidak membedakan keyakinan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi (Halim, 2015). Penulis melakukan analisis data fakta dengan mencari hubungan diberbagai sumber, membandingkan, bahkan menemukan hasil yang sebenarnya. Kemudian mencari serta menganalisa data-data dan sumber peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan judul yaitu pluralisme agama: membangun toleransi antar agama kemudian mengembangkan penelitiannya lalu menuliskan kembali sesuai dengan argumen penulis. Proses analisis yang dilakukan penulis adalah menggunakan berbagai sumber yang dapat dipertanggung jawabkan yang terpercaya untuk mendukung analisis penulis

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Pluralisme Agama**

Pluralisme agama secara etimologi berasal dari dua kata, dalam bahasa Inggris disebut religious pluralism. Dalam bahasa Arab diterjemahkan al- ta'addudiyah al- diniyyah. Thoha (2005:11-12) mendefinisikan pluralisme agama yaitu koeksistensi berbagai kelompok atau keyakinan di satu waktu dengan tetap terpeliharanya perbedaan dan karakteristik agama-agama tersebut. Terdapat kesulitan ketika mendefinisikan agama yang diakui sebagai kesepakatan bersama. Untuk itu, terdapat tiga pendekatan dalam mendefinisikan agama yaitu segi fungsi, institusi dan substansi. Pendefinisian tersebut sangat relatif tergantung latar belakang ahli. Ahli sejarah cenderung mendefinisikan agama sebagai suatu institusi historis, para ahli sosiologi dan antropologi mendefinisikan dari sudut fungsi sosialnya. Ahli teologi,

fenomenologi dan sejarah melihat dari aspek substansinya sebagai sesuatu yang sakral. Secara hakikat, tiga pendekatan tersebut adalah saling menyempurnakan dan melengkapi jika pluralisme agama didefinisikan sesuai objektif di lapangan.

Sementara Madjid (1998) menyebut pluralisme agama adalah adanya tiga sikap dialog. Pertama, sikap eksklusif melihat agama-agama lain salah, kedua, sikap inklusif agama lain sebagai bentuk implisit dari agama yang kita anut, sikap pluralis yaitu agama-agama adalah jalan yang sama dalam mencapai kebenaran. Islam pada dasarnya bersifat inklusif dan merentangkan tafsirannya ke arah yang semakin pluralis karena pluralisme sebagai *sunatullah* yang abadi. Paradigma inklusif memberikan sikap toleran bagi pemeluk agama lain karena juga terdapat kebenaran dan jalan keselamatan meskipun tak sesempurna agama yang dianutnya (Misrawi,2007).

Sikap inklusivisme ini, senantiasa mencoba mencari *common platform* atau di antara berbagai keragaman baik dalam intra agamamaupun antar agama. Dengan kata lain, perbedaan merupakan sebuah keniscayaan,akan tetapi terdapat titik temu yang bisa dipertemukan di antara perbedaantersebut. Sikap inklusif ini memberikan pandangan di mana agama yang lurus adalah yang membawa pesankemanusiaan universal yang merupakan esensi dari inklusivisme. Dalam pandangan Madjid, ajaran Nabi Muhammad SAW membawa pesan kemanusiaan universal sekaligus memiliki potensi kuat membangun *kalimatun sawa*(prinsip yang sama) dengan agama lainnya karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan ajaran tentang keterbukaan dan kerahmatan terhadap umat agama-agama di dunia. Yang harus diperhatikan dan dikembangkan yaitu sikap berbaik sangka terhadapkelompok lain, bukan sebaliknya.

Berkaitan pembahasan pluralisme, Agama Islam sejak awal telah memperkenalkan prinsip-prinsip pluralisme, atau lebih tepatnya pengakuan terhadap pluralitas dalam kehidupan manusia. Pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas itu dapat dielaborasi (uraikan) ke dalam dua perspektif; pertama teologis dan yang kedua sosiologis.

Dalam persepektif teologi Islam tentang agama-agamakontemporer, pembahasan tentang agama-agama dan relasinya mengambil bentuk dalam ilmu perbandingan agama diperkenalkan oleh almarhum Mukti Ali, mantan Guru Besar Ilmu Perbandingan Agama di IAIN Yogyakarta. Ali (1991) menciptakan suatu dialog positif antar agama- agama yang ada, terutama tiga

agamabesar yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam. Islam dalam Al-Qur'an telah disebutkan untuk menghormati agama lain dan melarang mencelanya. Firman Allah SWT Surah Al- An'am:

*“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”*(Q.S. Al-An'am: 108) Al-Qur'an sangat tegas mengakui keberadaan agama-agama lain dan menyerukan kepada umat Islam untuk hidup berdampingan secara damai. Namun perlu digaris bawahi di sini bahwa dengan mengakui keberadaan agama-agama lain, tidak berarti Islam membenarkan agama-agama itu. Harus dibedakan secara tegas antara mengakui dengan membenarkan.

Dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, terdapat lembaga- lembaga substitusi agama berdasarkan logika solidaritas organis. Negara merupakan jelmaan dalam mewujudkan solidaritas tersebut. Negara yang terbentuk ini turut memarginalisasi fungsi agama. Namun jika agama dalam negara benar-benar memiliki fondasi kuat maka agama tetap bertahan sebagai kekuatan latin dan merupakan sumber perubahan sosial. Untuk menjalankan fungsinya secara luas, agama menurut Rahardjo diperankan sebagai agama profetis. Agama profetis artinya agama yang tidak murni spiritual melainkan juga mengedepankan sosial dan politik sebagaimana peran agama zaman kenabian. Agama dalam negara memiliki dua bentuk: 1) bentuk kependetaan dimana agama memiliki peran lebih sebagai penyangga status quo dan memelihara integrasi melalui penyelenggaraan ritus-ritus. 2) agama bisa berperan sebagai kekuatan pembebas (agama profetis).

Agama dapat berperan secara profetis jika agama dirumuskan ke dalam suatu teologi yang responsif terhadap persoalan-persoalan konkret di masyarakat. Agama profetis mengarahkan kembali akar pemikiran yang paling fundamental (kebenaran, keadilan dan keindahan serta menyadari sisi kemanusiaannya). Acuan seperti ini menciptakan sikap kritis terhadap lingkungan dan alam fikiran yang mapan, termasuk dalam pikiran keagamaan sendiri. Kecenderungan seperti ini akan melahirkan teologi kontekstual dan mengacu kepada pembaharuan masyarakat. Dengan sendirinya, aliran ini memiliki resiko konflik perpecahan demi perubahan. Pada akhirnya teologi bercorak profetis memberikan tantangan pada agama kependetaan dalam menjaga status quo. Diakui peran agama profetis mengandung banyak resiko

namun masih memiliki kemungkinan untuk berkembang asalkan tidak menjurus pada radikalisme “fundamentalisme” atau radikalisme “teologi pembebasan”. Selanjutnya peran profetik membuka cakrawala melakukan dialog antar-iman dan berkehendak untuk melakukan komunikasi, karena telah mengambil sikap kritis terhadap apa yang mereka yakini selama ini. Peran diaologis inilah membuka ruang selanjutnya bagi perumusan platform bersama yang lebih luas.

Istilah masyarakat madani sebagaimana yang dikemukakan oleh kelompok Nurcholish yang berarti masyarakat yang beradab, berakhlak mutlak, dan berbudi pekerti luhur. Dalam islam masyarakat madani merujuk kepada seluruh masyarakat baik itu individu, keluarga, maupun negara, yang semuanya memiliki sifat dan budaya teras (berperadaban) untuk mewujudkan suatu masyarakat yang menegakkan nilai-nilai kebaikan (*ma'rūf*) demi terbentuknya masyarakat yang beradab (*tamaddūn*). Model masyarakat ideal dalam sejarah Islam ialah masyarakat dan negara Madinah. Jika dalam masyarakat Barat, *civil society* akhirnya adalah demokrasi yang lahir setelah proses sekularisasi. Masyarakat Islam, *civil society* (masyarakat madani) dibentuk dengan landasan, motivasi, dan etos keagamaan. Dari sini, Madjid memberikan porsi lebih pada agama atau kriteria paling utama masyarakat madani (Madjid, 2000).

Terdapat tiga tema besar rumusan masyarakat madani menurut Madjid. Pertama: demokrasi, kedua: masyarakat madani (*civil society*), dan ketiga: *civility*. Beliau berpandangan bahwa masyarakat madani adalah rumah bagi demokrasi dimana berbagai macam perserikatan, klub, gilda, sindikat, federasi, persatuan, partai dan kelompok bergabung untuk menjadi perisai antara negara dan warga negara. Sedangkan *civility* merupakan kualitas etik masyarakat madani, seperti keterbukaan, toleransi, dan kebebasan yang bertanggung jawab.

Madjid menyatakan bahwa kualitas masyarakat madani sangat ditentukan oleh sejauh mana *civility* tersebut dimiliki warganya. *Civility* mengandung makna toleransi, yang mempunyai arti kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial, juga bersedia untuk menerima pandangan bahwa tidak selalu ada jawaban yang benar atas suatu masalah (Yasmadi, 2005).

Peletakan fondasi agama dalam bernegara dalam mewujudkan masyarakat madani membutuhkan manusia-manusia yang berprinsip semangat ketuhanan, dengan konsekuensi berbuat baik kepada sesama manusia, dan juga dibutuhkan adanya keterlibatan dan partisipasi

dari seluruh lapisan masyarakat. Ciri-ciri masyarakat madani yakni egalitarianisme, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan, toleransi kemajemukan, dan musyawarah seperti telah dicontohkan Nabi SAW dalam memimpin umatnya.

## **2. Sikap Toleransi Beragama di Lingkungan Kerja dalam Perspektif Pluralisme dan Moderasi di lingkungan kerja RS Otak M.Hatta Bukittinggi**

Pluralisme adalah pandangan hidup dalam memahami, mengakui dan menerima adanya kemajemukan dan keanekaragaman dalam kelompok masyarakat. Kemajemukan adalah sebuah fenomena yang mustahil dihindari terutama kemajemukan agama. Masyarakat Indonesia termaksud masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai kelompok umat beragama, suku, dan ras, dan memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda. Salah Satu keberagaman agama dan budaya itu ada di lingkungan kerja RS Otak M.Hatta Bukittinggi. Berdasarkan data di kepegawaian RS Otak M.Hatta Bukittinggi didapatkan data Jumlah seluruh pegawai adalah 535 orang dimana pemeluk agama non muslim terdapat 8 orang (1,5%) dan 527 (98,5%) orang muslim.

Dalam wawancara, salah satu informan non-Muslim menyatakan, "*Bagi saya, bekerja dengan orang yang berbeda agama itu hal yang biasa. Justru perbedaan itu membuat lingkungan kerja jadi lebih kaya. Kami saling menghargai, saling belajar, dan tidak ada yang merasa lebih benar dari yang lain.*" Pernyataan ini menunjukkan adanya sikap pluralisme, di mana perbedaan agama dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan positif, serta dihargai sebagai bagian dari dinamika sosial yang sehat di tempat kerja.

Informan lain dari kalangan non-Muslim juga menambahkan, "*Kami terbiasa bekerja dengan berbagai latar belakang agama. Bahkan saat ada hari besar keagamaan, kami biasanya saling mengucapkan selamat dan memberi ruang bagi mereka yang merayakannya. Bagi kami, perbedaan itu memperkaya, bukan memisahkan, bahkan saat bekerja shift kami siap menggantikan jadwal kerja mereka di hari raya agamanya agar mereka bisa libur panjang dan pulang dan berkumpul dengan keluarga.*" Sikap ini menunjukkan penerimaan aktif terhadap perbedaan keyakinan dan menunjukkan adanya kesadaran kolektif dan saling toleransi untuk hidup berdampingan secara damai dalam konteks profesional.

Pernyataan dari non muslim lainnya mengatakan "*saya memang non-Muslim, tapi saya hafal beberapa ayat pendek dalam Al-Qur'an, seperti Al-Fatihah dan Al- Ikhlas. Itu karena*

*saya tumbuh di lingkungan yang banyak teman Muslimnya, dan saya sering ikut kegiatan bersama. Buat saya, memahami sedikit tentang agama orang lain itu bentuk pembelajaran dan perbandingan agama bahkan saat idul fitri saya ikut halal bihalal bersama."* Ungkapan ini mencerminkan sikap pluralisme dalam beragama, di mana keberagaman dipandang sebagai hal yang normal dan mempelajari agama lain untuk dijadikan perbandingan tanpa adanya sikap intoleran.

Sementara itu, seorang informan Muslim menyampaikan, "*Kami tetap menjaga prinsip-prinsip Islam dalam bekerja, tapi juga tidak memaksakan kepada orang lain. Kami menghormati perbedaan, dan selama tidak mengganggu keyakinan kami, kami terbuka untuk bekerja sama dengan siapa saja.*" Kalimat ini mencerminkan sikap moderasi, yakni keseimbangan antara menjalankan ajaran agama dengan tetap terbuka terhadap keragaman dan menjunjung tinggi sikap toleran dalam interaksi profesional.

Sementara itu, dari kalangan Muslim, seorang informan menyatakan, "*Islam mengajarkan keseimbangan. Dalam bekerja, saya tetap menjalankan ajaran agama saya, tapi saya juga sadar kalau saya hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Jadi saya selalu berusaha terbuka dan menghargai rekan kerja saya, apapun agamanya.*" Pernyataan ini menegaskan prinsip moderasi dalam beragama, yakni tidak bersikap ekstrem dan tetap menjaga harmoni sosial tanpa meninggalkan prinsip keimanan.

Informan Muslim lainnya menambahkan, "*Saya percaya bahwa menjadi seorang Muslim yang baik juga berarti menjaga hubungan baik dengan orang lain. Saya tidak pernah merasa terganggu bekerja dengan orang yang berbeda keyakinan. Yang penting kita punya niat baik dan saling menghormati.*" Ini memperkuat bahwa sikap moderasi di kalangan Muslim tercermin dalam praktik keseharian yang menjunjung tinggi toleransi, kedamaian, dan saling menghargai perbedaan di lingkungan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di atas, ditemukan bahwa pegawai non-Muslim cenderung menunjukkan sikap *pluralisme* dalam menjaga toleransi beragama di lingkungan kerja. Hal ini tercermin dari keterbukaan mereka terhadap keberagaman keyakinan serta kesediaan untuk menerima dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari kekayaan sosial. Sementara itu, pegawai Muslim menunjukkan pendekatan *moderasi* dalam menjaga toleransi beragama. Sikap ini ditandai dengan keseimbangan antara komitmen terhadap nilai-nilai keagamaan dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain, yang tercermin dalam sikap

inklusif, saling menghargai, dan menghindari sikap ekstrem dalam interaksi sosial di tempat kerja.

Hal tersebut sebagai salah satu wujud implementasi masyarakat dalam merawat hidup rukun bagi umat yang menganut agama yang berbeda tetap terjalin dengan baik. Agama yang diakui, diikuti, atau diyakini sebagai pedoman hidup dan sebagai kebenaran mutlak maka akan memiliki nilai dinamis, universal, fleksibel dan berorientasi ke depan baik bagi para penganutnya. Dengan begitu, dinamika kehidupan beragama dapat dilihat dari para penganutnya (Ghazali & Busro, 2017).

Setiap pemeluk agama memiliki ketentuan ajarannya masing-masing dengan penuh kesadaran untuk tidak saling membenarkan agama yang dianutnya. Sebab masing-masing agama mempunyai ajaran-ajaran tertentu, yang membedakan dan memiliki ciri-ciri khas dari yang lain. Perbedaan-perbedaan yang ada di antara agama- agama dalam berinteraksi secara penuh, tidak menonjolkan identitas agama yang dianut, dan juga tidak mengaktifkan simbol-simbol agama termasuk telah menghargai perbedaan-perbedaan yang ada.

Dengan demikian wujud toleransi atau kerukunan antar umat beragama akan terlaksana ketika terwujud interaksi antarumat beragama tidak saling merugikan satu sama lain. Setiap agama harus melaksanakan dan menggariskan dua pola hubungan setiap pemeluknya untuk mewujudkan kebaikan, yaitu hubungan yang bersifat horizontal dan hubungan yang bersifat vertikal. Hubungan yang bersifat horizontal atau pola hubungan manusia dengan masyarakat sekitar atau hubungan manusia dengan sesamanya yang berbeda ras, kebudayaan, agama baik itu dalam bentuk kemasyarakatan seperti bekerja sama, ataupun pola individu dengan individu untuk menjalin rasa persaudaraan yang lebih erat. Sedangkan hubungan vertikal membentuk hubungan manusia dengan penciptanya diwujudkan dengan setiap harinya beribadah sebagaimana digariskan pada tiap-tiap agama (Pradipta, et al., 2021).

Konflik antar pemeluk yang berbeda agama selalu muncul baik secara terlihat maupun laten. Konflik tersebut dicirikan sebagai persaingan untuk mencari pendukung dan persaingan untuk kemurnian dan keaslian dari ajaran agama masing-masing. Walaupun demikian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah berkomitmen bahwa modal dasar multikultural dan multiagama itu harus dirangkai dengan sikap toleransi dan jiwa integrasi. Kerukunan beragama merupakan salah satu arti dari sebuah toleransi. Prilaku ini sudah menjadi hal yang lumrah di

RS Otak m.Hatta Bukittinggi. Masyarakat multiagama saling menghargai dan mendorong satu sama lain dalam melakukan ibadah masing-masing.

Julita Lestari (2020) dalam judul tulisannya *Pluralisme Agama di Indonesia: Tantangan dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa*. Adapun hasil penelitiannya memaparkan bahwa keberagaman agama di satu sisi cenderung melahirkan perpecahan di kalangan umat beragama. Di sisi lain persatuan yang didorong oleh sikap saling menghargai akan perbedaan yang ada. Penelitian tersebut mengkaji kedua sisi pluralisme di Indonesia sebagai negara yang terbangun dari keragaman agama. Pluralitas agama di Indonesia memiliki tantangan dan peluang bagi keutuhan bangsa. Tantangan terbesar pluralitas bangsa ini adalah kecenderungan konflik yang bersumber dari truth claim (klaim kebenaran) masing-masing kelompok keagamaan. Sementara peluang pluralitas adalah sikap toleransi masing-masing penganut agama yang menopang keutuhan bangsa.

Toleransi berarti sikap yang menghargai membangun hal yang baik, dan perlu diterapkan dengan orang lain dalam bentuk keagamaan di lingkungan kerja. Juga toleransi adalah sikap yang sederhana sifat yang menghormati hak individu untuk memiliki keyakinan agama mereka sendiri tanpa memaksakan pandangan atau keyakinan kita kepada orang lain. Jika tidak adanya sikap toleransi dalam hal beribadah tentu saja akan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti adanya kekerasan antar agama, perpecahan, bahkan bisa saja terjadinya konflik antar agama sesama rekan kerja. Maka dari itu perlu untuk memberikan atau menerapkan hal yang baik khususnya toleransi dalam hal beribadah sekalipun keyakinan berbeda.

Toleransi sosial juga menghasilkan dimana interaksi sosial yang erat dalam masyarakat. Dalam kehidupan sosial beragama, tidak dapat diabaikan bahwa manusia akan berinteraksi, baik dalam satu kelompok maupun dengan kelompok antar agama yang berbeda/keyakinan dan yang berbeda (Hidayati, 2018). Dengan demikian untuk sebagai umat beragama sekalipun beda agama dan keyakinan, harus menciptakan kedamaian dan ketenangan dalam bertoleransi, supaya tidak terjadi stabilitas antar umat beragama sekalipun berbeda. Dalam hal ini tentu seringkali terjadi di lingkungan kerja Rumah Sakit Otak M.Hatta Bukittinggi adanya tantangan konflik akibat beda keyakinan praktik ibadah dan toleransi sekalipun nilai-nilai yang berbeda.

Di tengah keberagaman agama dan budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, dunia kerja dituntut untuk menjadi ruang yang inklusif dan harmonis. Rumah Sakit Otak M.

Hatta Bukittinggi sebagai institusi pelayanan kesehatan menghadirkan contoh nyata bagaimana nilai-nilai pluralisme dan moderasi beragama dapat diterapkan secara efektif untuk menjaga kerukunan antarpegawai dan mendukung profesionalisme kerja.

Sikap pluralisme, yang mengakui dan menghormati keberagaman, serta moderasi beragama, yang mengedepankan sikap tengah dalam menyikapi perbedaan keyakinan, telah menjadi bagian dari budaya kerja di rumah sakit ini. Pegawai dari berbagai latar belakang agama dapat menjalankan ibadah dengan leluasa karena adanya pengaturan jadwal yang toleran dan sikap beragama yang toleran.

Penerapan sikap pluralisme dan moderasi ini terbukti membawa dampak positif. Hubungan antarpegawai menjadi lebih harmonis, pelayanan terhadap pasien berlangsung lebih manusiawi, dan potensi konflik karena perbedaan keyakinan dapat diminimalisir. Dengan demikian, Rumah Sakit Otak M. Hatta Bukittinggi menunjukkan bahwa keberagaman bukan hambatan, melainkan kekuatan yang memperkaya dan memperkuat kualitas pelayanan publik.

Melalui contoh ini, terlihat jelas bahwa moderasi beragama dan pluralisme bukan hanya konsep ideal, tetapi juga solusi nyata dalam membangun ruang kerja yang toleran, adil, dan produktif. Toleransi ditumbuhkan oleh kesadaran yang bebas dari segala macam bentuk tekanan atau pengaruh serta terhindar dari nhipokrisis. Toleransi mengandung maksud untuk memungkinkan terbentuknya sistem yang menjamin keamanan pribadi, harta benda dan unsur-unsur minoritas yang terdapat dalam masyarakat. Ini direalisasikan dengan menghormati agama, moralitas dan lembagalembaga mereka serta menghargai pendapat orang lain dan perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungannya tanpa harus berselisih dengan sesamanya hanya karena berbeda keyakinan atau agama. Dalam kaitan dengan agama, toleransi mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ketuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) masing-masing yang dipilihnya serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya (Casram, 2016).

Menurut Nur Kholisah mengatakan bahwa sikap toleransi harus di tumbuhkan dan di tingkatkan di dalam diri tiap masyarakat. Karena dengan adanya toleransi, kita bisa menjadi warga negara yang rukun. Persatuan dan kesatuan yang ingin di capai juga bisa terjadi karena adanya sikap toleransi antar sesama. Toleransi antra sesama dapat mengihindaro konflik yang

memecahbelah indonesia, karena kita sebagai masyarakat atau warga negara indonesia saling menghargai perbedaan yang ada di Indonesia (Kholisah et al., 2021). Dan menurut Tian Adha Salsabilah mengatakan bahwa sikap toleransi dengan baik harus di tunjukkan oleh kesiapaun terhadap bentuk pluralitas yang ada di indonesia. Sebab toleransi merupakan sikap yang paling sederhana, akan tetapi mempunyai dampak yang positif bag integritas bangsa pada umumnya dan kerukunan masyarakat pada khususnya tidak adanya sikap toleransi dapat memicu konflik yang tidak di harapkan (Salsabilah et al., 2021). Pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa menjaga kerukunan antra agama adalah tugas pertama bagi umat beragama untuk menciptakan kedamaian antar kelompok yang berbeda dalam konteks menghargai sesama sekalipun berbeda.

Hal ini mejadi sebuah pemahaman bagi umat beragama bahwa mejaga nama baik atau mencega konflik antar agama di indonesia salah satunya menggunakan media dengan baik. Seperti berkomunikasi antar pihak yang berbeda, berkomunikasi antar yang berbeda keyakinan dan memberikan asuransi bagi umat beragama sekalipun berbeda. Hal ini dapat memberikan sebuah kesadarran antar umat beragama bahwa menggunakan media dengan baik sangat baik dalam keberagaman di Indonesia.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pluralisme pegawai RS Otak M.Hatta Bukittinggi dalam merawat kerukunan beragama merupakan bagian dari isi sila ke-3 pada pancasila sebagai dasar negara. Persatuan Indonesia memiliki makna yang luas. Hidup rukun, bertoleransi, saling menghargai, menciptakan perdamaian dan keamanan di negara tanpa saling membenci, menjatuhkan, merusak, menghianati serta tidak terjadinya konflik karena perbedaan suku, ras dan agama. Itu semua merupakan bentuk persatuan bernegara. Bentuk implementasi pluralisme dan kerukunan yang ialah jiwa warganegara yang memahami idiologi negara. Kemudian cara masyarakat merawat kerukunan beragama tersebut perlu di apresiasi baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat lain.

Dapat di lihat bahwa di lingkungan kerja memiliki beberapa agama yang telah di akui pemerintah adalah agama Kristen Protestan, Islam, Katolik, Budha dan Hindu. Pegawai non Islam di RS Otak M.Hatta Bukittinggi dalam menjaga toleransi dengan sikap pluralisme

beragama sedangkan pegawai beragama Islam memiliki sikap moderasi beragama dalam menjaga toleransi beragama antar pegawai dan pasien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. 1995. *Studi Agama: Normatifitas atau Historisitas*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Agpalo, R.E. 1992. *Modernization, Development, and Civilization: Reflections on the Prospects of Political Systems in the First, Second, and Third Worlds*” Washington: Taylor and Francis.
- Agustin, A. A. (2019). Perdamaian Sebagai Perwujudan Dalam Dialog Antar Agama. *Al- ada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(2), 17–34. <https://doi.org/10.31538/almada.v1i2.206>
- Akbar, M. 2017. *Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Surat Edaran Kapolri Se/06/X/2015)*. Jurnal. Universitas Lampung.
- Albab, A. U. (2019). Interpretasi Dialog Antar Agama Dalam Berbagai Prespektif. *Al- Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(1),22–34. <https://doi.org/10.31538/almada.v2i1.223>
- Ali, A. Mukti. 1991. *Ilmu Perbandingan Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ali, A. Mukti. 1993. *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*. Bandung, Mizan.
- Anonim. Diakses dari <http://en.wikipedia.org/pluralism.htm> pada 19 Mei 2018.
- Arifin, S. 2009. *Konstruksi wacana pluralisme di Indonesia*. Jurnal HUMANITY Volume V,
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Ketimpangan Bisa Memicu Konflik dan Terorisme* . diakses dari <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/bps-ketimpangan- pendapatan-bisa-memicu-konflik-dan-terorisme> pada 15 mei 2018
- Baderi. F. 2017. *Menyimak Konflik Sosial di Indonesia*. Diakses dari [article/81045/menyimak-konflik-sosial-di-indonesiapada-28-maret-2017](https://www.tribunnews.com/2017/03/28/menyimak-konflik-sosial-di-indonesiapada-28-maret-2017) pada 28 Maret 2017
- Casram, C. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 187–198. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>
- Coward, H. 1989. *Pluralisme: Tantangan Bagi Agama-Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Darmaputera, E. 1987. *Peranan Agama-Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Negara Pancasila yang Membangun*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.

- 
- Effendy, E., Abbas, M., & Astuti, S. (2023). Pemanfaatan Media Dakwah Islam Untuk Mencegah Konflik Sosial. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 2006–2012.
- Esack, F. 1997. *Membebaskan Yang Tertindas, Al-Quran, Liberalism Pluralisme*. Bandung, Mizan
- Halim, A. (2015). Pluralisme Dan Dialog Antar Agama. *TAJDID: Jurnal Ilmu ushuluddin*, 14(1), 35–62. <https://doi.org/10.30631/tjd.v14i1.21>
- Hartana, I. M. R. (2017). Analisis Konflik dan Solusi Pemolisian dalam Konflik Antar Agama di Tanjung Balai Sumatera Utara Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(April), 55–63. Hartworth: Kumarian Press.
- Hick, J., A. 1985. *Problems of Religious Pluralism*. New York: St. Martin's Press. Hidayat, K, dkk. 1995. *70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali*. Jakarta: Paramadina.
- Hick, J., A. 1995. *Christian Theology of Religion*, Kentucky, The Rainbow of Faith, Hick, J., A. 1995. *Christian Theology of Religion*. Kentucky, The Rainbow of Faith. Hidayati, M. T. H. dan N. (2018). *Peran Komisi Hubungan Antar Umat Beragama Gereja Katolik Dalam Membangun Dialog M Thoriqul Huda dan Nur Hidayati*. XIV(2), 194– 216. Jogjakarta: Insist.
- Khaerun Rijaal, M. A. (2021). Fenomena Intoleransi Antar Umat Beragama Serta Peran Sosial Media Akun Instagram Jaringan Gusdurian Indonesia Dalam Menyampaikan Pesan Toleransi. *Syiar | Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(2), 103–132. <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i2.41>
- Korten, D, C. 1990. *Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda*.
- Lathifah E. 2005. *Ringkasan Shahih Muslim*. Terjemahan. Jakarta: Gema Insani Press.
- Lorens, B. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Madjid, N. 1989. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Madjid, N. 1998. *Mencari Akar-Akar Islam bagi Pluralisme Modern: Pengalaman Indonesia dalam Jalan Baru Islam*. Bandung: Mizan.
- Madjid, N. 2000. *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Mediacita.

- Misrawi, Z. 2007. *Al- Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*. Jakarta: Fitrah Nomor 1, (80 – 92)
- Noor, N., M. 2015. *Manual etika lintas agama untuk indonesia*. Geneva: Globethics.net,
- Rachman, B.,M. 2011. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Jilid 4. Jakarta: Mizan.
- Rahardjo, M.,D. 2012. *Pembangunan Pasca modernis: Esai-Esai Ekonomi Politik*.
- Rao, J.,M. 2003 *Globalization, Debt and Development: Lessons and Policy Alternatives Facing Indonesia, in INFID, Creating Alternatives for Indonesia*. Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development.
- Rosyid, M. 2014. *Keselarasan Hidup Beda Agama dan Aliran: Interaksi Nahdliyin, Kristiani, Buddhis, dan Ahmadi di Kudus*. Fikrah, Vol. 2, No. 1 (75- 94) diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/61931-ID-keselarasan-hidup-beda-agama-dan-aliran.pdf> pada 11 maret 2025
- Said, N. 2005. *Perempuan dalam Teologi dan HAM di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Syamsuddin, A. 2010. *Pluralisme di Indonesia: Paham dan Amalan*. Diakses dari [http://muafakatmalaysia.com/tag/johnhick/#\\_ftn1](http://muafakatmalaysia.com/tag/johnhick/#_ftn1) pada 19 Maret 2025
- Thoha A.,M. 2005. *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Depok: Perspektif.
- Yasmadi. 2005. *Modernisasi Pesantren*. Ciputat: Ciputat Press.
- Zuhdi, M., H. *Pluralisme dalam Perspektif Islam*. IAIN Mataran.